

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA MANDIRI PETERNAK
AYAM POTONG DI DESA POLOSIRI KECAMATAN BAWEN
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Arifina Wahyu Setyawan

NPP. 32.0413

Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0413@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Haikal Ali, SE, MTP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Polosiri Village is one of the areas with significant potential for broiler chicken farming as a source of livelihood for its community. This activity plays an important role in reducing unemployment and crime rates, as well as improving residents' welfare. However, in its implementation, various obstacles exist, such as low membership in farmer groups and limited marketing networks. **Purpose:** This study aims to analyze the inhibiting factors in the empowerment of independent broiler chicken farmers in Polosiri Village and to identify the efforts made by the government to overcome these obstacles. **Methods:** The method used is qualitative study with data collection through in-depth interviews, field observations, and document reviews related to community empowerment and government regulations. **Results/Findings:** The main findings indicate that the lack of farmer participation in groups is the primary barrier to accessing government assistance. In addition, limited marketing partnership networks cause farmers to still depend on local middlemen, resulting in suboptimal income potential. The village and sub-district governments have made efforts to address these obstacles through socialization to strengthen groups, provision of facilities and infrastructure assistance, and facilitation of broader marketing partnerships. **Conclusion:** The empowerment of broiler chicken farmers in Polosiri Village has brought positive social and economic changes but still faces challenges that need to be addressed comprehensively by increasing group participation and developing better marketing networks.

Keywords: *Community Empowerment, Independent Business, Broiler Poultry Farmers, Polosiri Village, Economic Welfare.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Desa Polosiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi budidaya ayam potong sebagai sumber penghidupan masyarakatnya. Kegiatan ini berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, seperti kurangnya keanggotaan kelompok peternak dan keterbatasan jaringan

pemasaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat pemberdayaan usaha mandiri peternak ayam potong di Desa Polosiri serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian dokumen terkait pemberdayaan masyarakat serta regulasi pemerintah. **Hasil/Temuan:** Temuan utama menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi peternak dalam kelompok menjadi penghambat utama akses terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, jaringan kemitraan pemasaran yang terbatas menyebabkan peternak masih bergantung pada tengkulak lokal, sehingga potensi pendapatan kurang maksimal. Pemerintah desa dan kecamatan berupaya mengatasi hambatan ini melalui sosialisasi penguatan kelompok, pemberian bantuan sarana prasarana, serta fasilitasi kemitraan pemasaran yang lebih luas. **Kesimpulan:** Pemberdayaan peternak ayam potong di Desa Polosiri telah membawa perubahan sosial dan ekonomi positif, namun masih menghadapi tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif melalui peningkatan partisipasi kelompok dan pengembangan jaringan pemasaran yang lebih baik.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Mandiri, Peternak Ayam Potong, Desa Polosiri, Kesejahteraan Ekonomi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, pembangunan menjadi hal yang tidak terhindarkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual masyarakat. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dengan luas wilayah 950,207 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.053.094 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan. Lokasinya yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi, termasuk peternakan. Sesuai Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera dan menikmati lingkungan yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, pengembangan sektor peternakan ayam potong menjadi salah satu alternatif strategis. Peternakan ini digemari karena perawatannya mudah, waktu panen singkat, permintaan pasar tinggi, dan harga terjangkau.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroiti permasalahan yang relevan, namun belum secara spesifik membahas konteks lokal di Kabupaten Semarang. Penelitian oleh Anang & Kadir, (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan produksi sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan input seperti pakan konsentrat, tenaga kerja, pengalaman peternak, dan vaksinasi yang tepat. Meskipun hasil ini memberikan gambaran penting mengenai faktor produksi, konteks geografis dan tantangan sosial-ekonomi di Biak Numfor tentu berbeda, sehingga temuan tersebut belum bisa dijadikan acuan langsung untuk pengambilan kebijakan lokal. Permasalahan serupa juga ditemukan dalam sektor perkebunan di daerah lain. Penelitian oleh Anggraini, dkk (2022) mengenai pemberdayaan petani kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan petani, ketidakstabilan harga jual, keterbatasan sarana dan prasarana, serta

rendahnya kepercayaan antaranggota kelompok tani menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa permasalahan struktural seperti kapasitas SDM yang rendah dan kurangnya dukungan infrastruktur merupakan tantangan umum dalam upaya pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Sementara itu, penelitian oleh Alarcon dkk.,(2017) menekankan pentingnya manajemen kesehatan ternak dan penguatan kepercayaan antara peternak dan pemerintah dalam pengelolaan peternakan, terutama pada skala kecil. Studi ini menunjukkan bahwa kurangnya tenaga terlatih dan tidak optimalnya peran pemerintah menjadi penghambat dalam pengendalian penyakit dan peningkatan produksi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Semarang (2023), total produksi ayam potong mencapai 6.751.768 kg. Beberapa kecamatan seperti Getasan (891.661 kg), Ungaran Timur (849.378 kg), dan Tengaran (838.964 kg) menjadi penghasil terbesar. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya di Desa Polosiri, Kecamatan Bawen. Data profil Desa Polosiri (2023) menunjukkan bahwa dari total penduduk usia produktif, sekitar 27% belum bekerja. Padahal, desa ini memiliki potensi besar di bidang peternakan ayam potong melalui kelompok usaha mandiri yang telah terbentuk. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengapa sumber daya dan peluang yang tersedia belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara maksimal. Permasalahan utama yang dihadapi peternak adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam budidaya ayam potong. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, edukasi, serta fasilitasi modal usaha. Dalam konteks ini, Pemerintah Kecamatan Bawen melalui Kepala Desa Polosiri telah berupaya membentuk kelompok peternak ayam potong sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Harga pasar daging ayam di Kabupaten Semarang yang berada pada kisaran Rp30.000–Rp37.000 per kilogram menjadi indikator bahwa usaha peternakan ayam potong berpotensi memberikan keuntungan ekonomi. Di masa pasca-pandemi COVID-19, ketika kebutuhan pangan menjadi prioritas, usaha ini diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian lokal dan sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara ideal, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, seperti peternakan ayam potong, seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, letak geografis yang strategis, dan harga pasar ayam potong yang kompetitif, masyarakat desa seharusnya dapat mengembangkan usaha peternakan secara produktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah pun diharapkan hadir secara aktif dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap permodalan dan pemasaran, sehingga kelompok peternak dapat tumbuh secara mandiri dan profesional. Namun pada kenyataannya, di Desa Polosiri, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Data menunjukkan bahwa sekitar 27% penduduk usia produktif masih belum bekerja, padahal telah tersedia kelompok usaha mandiri peternakan ayam potong. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi sumber daya dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sektor produktif. Realita ini diperparah oleh minimnya keterampilan teknis masyarakat dalam beternak, rendahnya akses terhadap pelatihan, dan terbatasnya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas peternak. Selain itu, belum ada sistem pembinaan yang terstruktur untuk memperkuat kelembagaan kelompok peternak ayam potong, padahal keberadaannya penting dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan produksi pasca-pandemi. Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada tidak selarasnya antara potensi ekonomi peternakan ayam potong dengan kondisi aktual pemberdayaan masyarakat, yang menyebabkan kegiatan usaha mandiri belum berkontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa Polosiri. Penelitian ini hadir untuk menelusuri lebih dalam faktor-

faktor penyebab kesenjangan tersebut, serta mengevaluasi peran pemerintah desa dalam menjembatani kebutuhan masyarakat menuju pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran pemerintah maupun konteks pemberdayaan peternak ayam petelur masyarakat. Penelitian Program kemitraan PT. Cemerlang Unggas Lestari (CUL) di Kabupaten Banyumas terbukti efektif dengan tingkat efektivitas 86,24% dan komitmen tinggi dari peternak. Pemerintah berperan kuat dalam pemberdayaan melalui penyediaan informasi, pelatihan, akses pasar, dan permodalan, meskipun akses modal masih perlu ditingkatkan (Hartoyo, dkk 2024). Pelatihan di Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewirausahaan, termasuk perencanaan anggaran, pemasaran, dan promosi. Pelatihan ini mendorong pola pikir mandiri dan profesional, yang berdampak pada peningkatan daya saing dan pendapatan Masyarakat (Berno & Jupesmas, 2022). Pemerintah desa juga berperan penting dalam memberikan edukasi dan solusi atas konflik sosial akibat peternakan ayam potong, serta sebagai fasilitator pemberdayaan yang mampu meningkatkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja (Purnawati, 2020).

Penelitian Lestari dan Maimunah berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Ternak Ayam Petelur DI Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang (Lestari & Maimunah, 2023) menemukan bahwa baik secara parsial maupun simultan bahwa variabel jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, dan luas kandang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi telur di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian Rahmawati, dkk menemukan bahwa peran, kinerja dan inovasi penyuluh berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keberdayaan peternak ayam ras petelur di Kabupaten Jember (Rahmawati dkk., 2016) Penelitian Ahmad, dkk menemukan bahwa strategi yang dihasilkan mampu meningkatkan produksi ayam ras petelur agar menghasilkan telur yang berkualitas, pengembangan pasar keluar daerah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar (Ahmad dkk., 2023) Penelitian Djameluddin et al., (2020) menemukan bahwa terdapat peran Pemerintah Desa Tanete dalam membuat kebijakan untuk kebijakan menciptakan iklim usaha peternakan ayam petelur yang kondusif meliputi pemberian kesempatan yang setara bagi semua calon pelaku usaha, kemudahan dalam proses perizinan yang sejauh ini tidak mengalami penolakan, terciptanya persaingan usaha yang sehat melalui dukungan asosiasi perunggasan, serta terjaminnya kesehatan ternak berkat kerja sama dengan dinas peternakan dan mitra usaha dalam pengelolaan biosekuriti. Penelitian Suwannasri & Promphakping, (2022) menunjukkan bahwa peternakan ayam petelur di Ban Klang telah berlangsung lebih dari 40 tahun dengan praktik berkelanjutan, seperti pertanian padi tradisional, penggunaan bahan lokal untuk kandang, manajemen pakan dan pupuk, distribusi produk, serta dukungan dari konsumen lokal. Studi ini merekomendasikan agar peternak mengembangkan usaha mereka sejalan dengan prinsip peternakan organik dan menjalin kerja sama investasi dengan pemerintah serta pelaku usaha lokal. Terdapat juga penelitian oleh Onono dkk., (2018) yang menunjukkan tantangan dalam produksi yang meliputi pakan berkualitas rendah, keterbatasan lahan, masalah keamanan, penyakit, dan minimnya informasi manajemen ayam. Meskipun peternakan ayam petelur membantu ketahanan pangan rumah tangga di perkotaan, sistem ini masih rentan terhadap masalah penyakit dan keamanan pangan yang perlu diatasi melalui penelitian dan penyuluhan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam konteks kajian mitigasi bencana banjir yang berfokus pada wilayah geografis timur Indonesia, yaitu Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang selama ini masih jarang disentuh dalam literatur akademik secara spesifik dan komprehensif. Meskipun telah banyak studi sebelumnya yang membahas mitigasi banjir di berbagai kota besar seperti Semarang, Manado, dan Barito Kuala, penelitian ini menjadi berbeda karena mengangkat karakteristik lokal Sentani yang unik: letaknya yang strategis di antara Pegunungan Cycloop dan Danau Sentani, curah hujan tinggi, serta keberadaan 12 sungai besar yang rawan meluap secara simultan. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis kebijakan, kapasitas kelembagaan (khususnya BPBD), dan partisipasi masyarakat lokal dalam satu kerangka analisis mitigasi struktural dan non-struktural. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan potret risiko dan dampak, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dirumuskan (seperti revisi RTRW dan normalisasi sungai) berjalan di lapangan, serta mengidentifikasi faktor penghambat seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan regulasi teknis. Dengan mengangkat konteks lokal Distrik Sentani secara spesifik, serta mengaitkan dinamika kelembagaan dan sosial budaya setempat dalam upaya mitigasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan strategi penanggulangan bencana berbasis wilayah. Kebaruan ini penting dalam upaya mendesain kebijakan mitigasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di kawasan rawan bencana di Indonesia Timur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan ayam potong di Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks aslinya, bukan dalam situasi yang dibuat-buat seperti eksperimen laboratorium. Dengan menggunakan paradigma postpositivistik, penelitian ini mengakui bahwa realitas sosial memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tidak selalu dapat diukur atau dijelaskan melalui angka-angka kuantitatif semata. Oleh karena itu, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan dan analisis data secara mendalam di lapangan. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019:173). Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui kegiatan lapangan seperti wawancara dan observasi. Data ini sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen resmi, laporan lembaga, buku, jurnal ilmiah, dan data statistik yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung

analisis yang dilakukan terhadap data primer sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam (Simangunsong, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mandiri Peternakan Ayam Potong

1. Peluang (Enabling)

Upaya pemberdayaan dalam budidaya ayam potong di Desa Polosiri diwujudkan melalui pengembangan kapasitas peternak dan kemudahan dalam perizinan usaha. Pemerintah desa, bekerja sama dengan Tim Penyuluh Pertanian dan Peternakan Kecamatan Bawen, secara rutin memberikan pelatihan dan penyuluhan teknik budidaya ayam potong. Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi penyelenggaraan seminar yang mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak.

Sebagai bentuk dukungan terhadap standar nasional, pemerintah desa juga membantu penerbitan sertifikat Cara Budidaya Ternak yang Baik (CBTB) yang merupakan salah satu prasyarat ekspor. Langkah ini menunjukkan kesesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggarisbawahi pentingnya pembangunan kapasitas masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam perspektif teori pemberdayaan menurut Suharto (2014), serta prinsip *capacity building* menurut World Bank (dalam Riyadi Soeprapto), kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia, dukungan regulatif, serta peningkatan akses terhadap informasi dan pelatihan teknis. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *enabling* berjalan efektif, berorientasi pada peningkatan kemampuan peternak secara berkelanjutan.

a. Kemudahan Perizinan dan Dukungan Kebijakan

Aspek *enabling* juga terlihat dari adanya kemudahan dalam perizinan usaha budidaya ayam potong. Pemerintah desa dan kecamatan tidak hanya memberikan edukasi dan pendampingan teknis, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif dalam proses administrasi, seperti pengurusan Izin Usaha Peternakan (IUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penyuluh dan pendamping dari kecamatan secara aktif mendampingi kelompok peternak, membantu identifikasi permasalahan lapangan, serta merumuskan solusi bersama. Permasalahan seperti penyakit avian influenza ditangani dengan pendekatan kolaboratif antara penyuluh dan peternak. Aktivitas ini mencerminkan bentuk pemberdayaan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Penguatan (Empowering)

Penguatan merupakan elemen kunci dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat, yang apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten, dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan. Di Desa Polosiri, penguatan ini tampak nyata dalam konteks pemberdayaan peternak ayam potong melalui tiga aspek utama: peningkatan kemampuan manajerial, penguatan pengetahuan teknis dan teknologi, serta pengembangan strategi usaha.

a. Peningkatan Kemampuan Manajemen Usaha

Pemerintah Desa Polosiri secara aktif mendukung penguatan kapasitas manajerial peternak ayam potong melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti alat tulis kantor, bibit ayam, pakan ternak, dan obat-obatan. Salah satu bentuk nyata dari intervensi ini adalah pembangunan Balai Usaha Mandiri Unggas pada tahun 2016, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan peternakan terorganisir dan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Selain itu, dana dari Pendapatan Asli Desa (PADes)

dialokasikan setiap tahun untuk menunjang kebutuhan operasional Kelompok Usaha Mandiri Unggas. Dukungan ini diharapkan mampu menciptakan kestabilan usaha, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan kemandirian peternak secara berkelanjutan.

b. Penguatan Pengetahuan Teknis dan Teknologi Beternak

Peningkatan kapasitas teknis peternak dilakukan melalui edukasi dan penyediaan infrastruktur pendukung. Pemerintah desa dan kecamatan telah menyalurkan peralatan budidaya, bibit ayam, pakan, dan obat-obatan untuk memperkuat kompetensi teknis peternak. Balai Usaha Mandiri Unggas juga berperan dalam mentransfer pengetahuan terkait teknologi budidaya. Namun demikian, beberapa permasalahan masih ditemukan, seperti kualitas pakan yang belum optimal dan keterbatasan cakupan bantuan, yang hanya menjangkau peternak anggota kelompok. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses, terutama bagi peternak yang belum **tergabung dalam kelompok formal.**

c. Strategi Pengembangan Usaha

Strategi pengembangan usaha diarahkan pada peningkatan keberlanjutan dan daya saing peternak ayam potong melalui pendistribusian bantuan sarana dan prasarana, serta penguatan kelembagaan kelompok. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa bantuan berupa bibit ayam, peralatan budidaya, dan pakan telah disalurkan kepada Kelompok Usaha Mandiri Unggas. Strategi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan peternak.

3. Perlindungan (Protecting)

Perlindungan terhadap aspek pemasaran merupakan elemen penting dalam rantai usaha budidaya ayam potong, meliputi kegiatan promosi, distribusi, dan penetapan harga yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan peternak dan kelangsungan usaha mereka di Desa Polosiri.

a. Penetapan Regulasi Standar Harga Pasar

Penetapan harga ayam potong di Desa Polosiri dilakukan secara mandiri melalui kesepakatan antara peternak dan mitra kemitraan, seperti tengkulak lokal, dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan pengawas, tanpa terlibat langsung dalam penentuan harga atau mekanisme pemasaran. Sistem kemitraan ini menjaga kestabilan harga dan memberikan kepastian bagi peternak, dimana harga yang disepakati tetap dipertahankan walaupun terjadi fluktuasi pasar. Kerjasama ini memperkuat posisi tawar peternak dan meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar.

b. Perlindungan Hak Peternak

Perlindungan hak peternak difokuskan pada pengawasan agar kemitraan usaha berjalan adil dan saling menguntungkan, menghindarkan peternak dari praktik yang merugikan oleh pihak mitra seperti tengkulak. Pemerintah desa melalui Kecamatan Bawen bertanggung jawab sebagai fasilitator yang memastikan hubungan kemitraan terjalin secara proporsional dan sesuai dengan prinsip kesetaraan. Landasan hukum pemberdayaan dan perlindungan peternak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak yang menegaskan pentingnya kemitraan usaha berbasis jejaring dan optimalisasi sumber daya dengan prinsip saling

menguntungkan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban pembinaan terhadap implementasi kemitraan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan peternak.

4. Penyokongan (Supporting)

Dalam pemberdayaan peternak ayam potong, pembentukan lembaga usaha tidak hanya bertujuan untuk eksistensi kelembagaan semata, tetapi lebih pada efektivitas dan keberlanjutan fungsi kelembagaan tersebut agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat peternak di Desa Polosiri.

a. Penyediaan Dukungan Modal dan Sarana Produksi

Dukungan modal dan sarana produksi yang diberikan kepada kelompok usaha mandiri peternak ayam potong menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan. Bantuan pemerintah disalurkan secara kolektif kepada kelompok peternak, bukan individu, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara berkelanjutan. Namun, terdapat perbedaan akses terhadap bantuan ini antara peternak yang tergabung dalam kelompok dan yang menjalankan usaha secara mandiri. Peternak mandiri menyatakan tidak mendapatkan bantuan maupun informasi yang memadai, sehingga terjadi ketimpangan distribusi bantuan pemerintah. Data dari DPPKP Kabupaten Semarang (2024) menunjukkan dari 43 peternak hanya 24 orang tergabung dalam kelompok, sedangkan 19 orang tidak bergabung.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 menegaskan bahwa pemberdayaan peternak harus mencakup pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan fasilitasi kelembagaan untuk meningkatkan kewirausahaan peternak secara menyeluruh. Hal ini menekankan pentingnya memperluas akses dan inklusivitas dalam pemberian dukungan agar fungsi kelembagaan dapat berjalan optimal dan merata.

b. Memfasilitasi Akses Pasar dan Jaringan Pemasaran

Pengembangan jaringan kemitraan bisnis menjadi faktor krusial untuk keberlangsungan usaha budidaya ayam potong. Kemitraan usaha merupakan kolaborasi antara pelaku usaha dalam berbagai skala, yang didasarkan pada prinsip interdependensi, dukungan mutual, dan keuntungan bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 menekankan bahwa perusahaan peternakan harus melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan alih teknologi dalam kemitraan dengan peternak. Hal ini sejalan dengan pandangan World Bank mengenai pentingnya jaringan kerja yang efektif untuk membangun kemitraan yang kokoh.

5. Pemeliharaan (Fostering)

Pemeliharaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek fisik lingkungan, seperti pelestarian sumber daya alam dan ekosistem, melainkan juga mencakup pemeliharaan kondisi lingkungan sosial. Hal ini penting dalam aktivitas budidaya ayam potong, di mana limbah kotoran ayam selain berdampak pada kualitas lingkungan fisik juga berpotensi menimbulkan gangguan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

a. Menjamin Keberlanjutan Usaha Peternakan

Keberlanjutan usaha peternakan ayam potong menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Polosiri. Sebelum adanya budidaya ayam potong, Desa Polosiri dikenal dengan stigma negatif sebagai “daerah merah” akibat tingginya angka kriminalitas dan pengangguran. Banyak warga terjerat tindakan kriminal sebagai akibat tekanan ekonomi yang berat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, Pasal 30, menggarisbawahi peran strategis kelompok peternak dalam mengembangkan usaha yang mandiri dan berkelanjutan, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

b. Memelihara Kualitas Produksi dan Standar Kesehatan

Dalam rangka menjaga kualitas produksi dan kesehatan ternak, Pemerintah Desa Polosiri bersama dinas terkait menjalankan berbagai upaya pemeliharaan, meliputi:

- 1) Pelatihan dan penyuluhan teknis kepada peternak mengenai manajemen kandang, pakan, pencatatan produksi, serta deteksi dini penyakit ayam.
- 2) Program vaksinasi unggas secara berkala dan pendampingan teknis dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang.
- 3) Penyediaan sarana pendukung seperti disinfektan dan alat sanitasi.

c. Evaluasi Program dan Kontrol Kualitas

Evaluasi dan kontrol kualitas dilakukan secara berkala melalui pertemuan rutin antara kelompok peternak dan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai efektivitas program pemberdayaan.
- 2) Mengidentifikasi kendala teknis di lapangan.
- 3) Merumuskan langkah perbaikan dan pendampingan lanjutan.

3.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mandiri Peternak Ayam Potong

Desa Polosiri dikenal memiliki aktivitas budidaya ayam potong yang cukup aktif dengan permintaan pasar yang stabil, sehingga secara umum usaha ini memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam usaha ini.

a. Keterbatasan Akses Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan budidaya ayam potong. Namun, terdapat kesenjangan dalam distribusi bantuan pemerintah, khususnya bagi peternak yang tidak tergabung dalam kelompok usaha mandiri.

b. Ketergantungan pada Kelompok Peternak dan Kelembagaan yang Terbatas

Kelompok Usaha Mandiri Unggas memiliki peran strategis sebagai wadah kolektif untuk saling mendukung dalam teknis budidaya dan penanganan kendala. Namun, masih ada sejumlah peternak yang menjalankan usaha secara individu dan tidak bergabung dalam kelompok, sehingga tidak terjangkau oleh berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan melalui kelompok.

c. Terbatasnya Jaringan Kemitraan dan Pemasaran

Jaringan kemitraan usaha sangat penting untuk mempercepat dan memperluas pemasaran produk. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, jaringan kemitraan peternak ayam potong di Desa Polosiri masih terbatas pada skala lokal. Mayoritas peternak masih mengandalkan pemasaran konvensional melalui pengepul atau tengkulak, yang berpotensi mengurangi keuntungan dan efisiensi distribusi produk.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan program pemberdayaan, khususnya di Desa Polosiri yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis lokal melalui budidaya ayam potong. Salah satu upaya penting adalah mendorong seluruh peternak untuk bergabung dalam kelompok ternak. Hal ini bertujuan agar peternak tidak tertinggal informasi penting dan dapat mengakses bantuan dari pemerintah dengan lebih mudah. Kesadaran berkelompok juga dapat meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar peternak mulai dari pembibitan, perawatan, hingga pemasaran hasil ternak. Kelompok ternak menjadi jalur utama penyaluran bantuan pemerintah, sehingga peternak yang tergabung dapat menerima fasilitas sarana dan prasarana yang membantu mengurangi biaya produksi. Selain itu, kemitraan usaha sangat penting dalam mendukung keberlanjutan peternakan ayam potong, terutama dalam pemasaran hasil panen. Selama ini, peternak menjual hasilnya melalui tengkulak lokal dengan jangkauan pasar yang terbatas. Pemerintah desa telah mendorong penerapan sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ternak yang Baik) sebagai syarat untuk menjual produk ke luar daerah, yang membuka peluang perluasan pasar. Pemerintah Kecamatan juga aktif memfasilitasi pembentukan kemitraan dengan tengkulak dari luar daerah untuk memperluas pangsa pasar dan menstabilkan harga jual produk ayam potong. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dengan melakukan pengawasan dan perlindungan agar usaha peternak dapat berjalan berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan usaha mandiri peternak ayam potong di Desa Polosiri. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang peternakan masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal keanggotaan kelompok, akses pasar, dan implementasi standar budidaya. Pertama, rendahnya partisipasi peternak dalam kelompok ternak menjadi hambatan signifikan. Banyak peternak di Desa Polosiri memilih menjalankan usaha secara mandiri tanpa bergabung dalam kelompok, sehingga mereka tidak memperoleh informasi, pelatihan, atau bantuan yang disalurkan melalui kelompok resmi. Akibatnya, mereka tertinggal dalam hal inovasi budidaya, tidak memiliki akses terhadap program-program pemberdayaan pemerintah, serta kehilangan peluang kolaborasi yang dapat mendorong efisiensi usaha dan solidaritas antarpeternak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartoyo dkk. (2024) tentang kemitraan PT. Cemerlang Unggas Lestari (CUL) yang menegaskan pentingnya peran kelompok dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan melalui peningkatan akses informasi dan dukungan permodalan. Selain itu, Rahmawati dkk. (2016) menekankan bahwa penyuluh memiliki peran penting dalam memperkuat keberdayaan peternak, yang keberhasilannya bergantung pada keterlibatan aktif peternak dalam sistem kelompok. Kedua, terbatasnya jaringan kemitraan pemasaran menjadi kendala serius yang berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan peternak. Sebagian besar peternak di Desa Polosiri masih menjual ayam potong kepada tengkulak lokal dengan harga rendah, yang membuat posisi tawar mereka lemah. Pemerintah desa memang telah melakukan upaya untuk memperluas jaringan kemitraan dengan pembeli luar daerah, tetapi pelaksanaannya masih belum merata dan belum menjangkau seluruh peternak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Ahmad dkk. (2023) yang menemukan bahwa strategi pengembangan pasar keluar daerah dan kerja sama dengan perusahaan besar dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan peternak ayam ras petelur secara signifikan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah

setempat untuk memperluas dan memperkuat jaringan distribusi, serta memberikan pendampingan berkelanjutan agar peternak dapat mengakses pasar yang lebih menguntungkan. Ketiga, keberadaan sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ternak yang Baik) di Desa Polosiri merupakan inovasi positif yang mendorong peningkatan kualitas hasil budidaya. Sertifikasi ini memungkinkan peternak untuk menembus pasar yang lebih luas dan menuntut standar produksi yang lebih tinggi. Namun, implementasinya belum merata karena beberapa peternak belum memahami manfaat sertifikasi atau belum mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi berkelanjutan dan pendampingan teknis bagi peternak. Penelitian Djamaluddin dkk. (2020) menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan kerja sama antara pemerintah desa dan dinas peternakan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk dalam penerapan standar biosekuriti dan sertifikasi. Selain itu, studi oleh Suwannasri & Promphakping (2022) di Thailand menegaskan pentingnya praktik berkelanjutan dan dukungan konsumen lokal dalam mewujudkan peternakan yang tahan lama dan ramah lingkungan—yang sejalan dengan arah tujuan penerapan CBIB di Desa Polosiri. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan peternak ayam potong bukan hanya soal bantuan ekonomi atau teknis, tetapi juga soal penguatan kelembagaan (kelompok), peningkatan akses pasar, dan penguasaan standar kualitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga pendukung lainnya agar potensi peternakan ayam potong di Desa Polosiri dapat berkembang secara berkelanjutan dan merata.

3.5 Diskusi topik menarik lainnya

Salah satu isu menarik yang layak didiskusikan lebih lanjut adalah peran teknologi digital dalam mendukung pemberdayaan peternak ayam potong, khususnya dalam konteks desa seperti Polosiri. Saat ini, transformasi digital mulai merambah sektor pertanian dan peternakan, termasuk dalam hal pemasaran hasil ternak, akses informasi, hingga manajemen produksi. Namun, belum banyak peternak di Desa Polosiri yang memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Digitalisasi dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi tantangan keterbatasan akses informasi dan pasar. Misalnya, melalui platform digital seperti marketplace pertanian/peternakan, peternak dapat langsung menjual produknya kepada konsumen akhir atau pelaku usaha di luar daerah, sehingga tidak bergantung pada tengkulak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nugroho dan Suryana (2021), yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan daya saing produk peternakan di pasar nasional. Lebih lanjut, penggunaan aplikasi pencatatan produksi dan manajemen keuangan sederhana berbasis Android juga dapat membantu peternak mengelola usaha secara lebih profesional. Namun, implementasi teknologi ini masih terhambat oleh keterbatasan literasi digital di kalangan peternak serta kurangnya pendampingan dari pihak eksternal seperti dinas peternakan atau mitra perguruan tinggi. Studi oleh Setyowati dan Rahayu (2022) menyarankan bahwa pelatihan literasi digital yang terintegrasi dengan program pemberdayaan akan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan adaptif peternak terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal akses terhadap gawai atau internet, tetapi juga bagian dari transformasi sosial-pendidikan peternak desa menuju kemandirian ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks Desa Polosiri, integrasi program digitalisasi ke dalam strategi pemberdayaan perlu dipertimbangkan, termasuk kerja sama dengan startup agritech atau institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan solusi digital yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan lokal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan usaha mandiri peternak ayam potong di Desa Polosiri masih menghadapi sejumlah hambatan utama yang bersifat kelembagaan, sosial, dan pemasaran. Salah satu hambatan paling signifikan adalah rendahnya tingkat keanggotaan peternak dalam kelompok ternak, yang menyebabkan sebagian peternak tidak memperoleh akses informasi dan bantuan pemerintah secara merata. Ketidakterlibatan ini menghambat pembentukan solidaritas dan kerja sama yang dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Selain itu, keterbatasan jaringan kemitraan pemasaran menimbulkan ketergantungan pada tengkulak lokal dengan harga yang kurang menguntungkan, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan peternak. Walaupun pemerintah telah berupaya membangun kemitraan dengan tengkulak dari luar daerah, upaya ini belum sepenuhnya efektif dan masih perlu diperluas untuk mencakup lebih banyak peternak. Penerapan sertifikasi CBIB menjadi langkah positif dalam meningkatkan standar kualitas budidaya dan membuka akses pasar yang lebih luas. Namun, tantangan dalam penyebaran dan pemahaman sertifikasi ini masih harus diatasi agar dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh oleh para peternak. Secara keseluruhan, pemberdayaan usaha mandiri peternak ayam potong membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi, meliputi peningkatan partisipasi kelompok, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kemitraan pemasaran yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat fungsi fasilitasi, sosialisasi, dan pendampingan agar seluruh peternak dapat menikmati manfaat program pemberdayaan secara merata dan usaha peternakan ayam potong di Desa Polosiri dapat berkembang secara optimal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini masih terbatas pada aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi dengan fokus pada kelompok peternak dan pemasaran lokal. Data kuantitatif terkait produksi dan dampak ekonomi makro belum sepenuhnya dianalisis, sehingga hasil temuan bersifat deskriptif dan kontekstual.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji aspek teknis budidaya dan manajemen usaha secara kuantitatif, serta evaluasi dampak jangka panjang program pemberdayaan terhadap perubahan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, eksplorasi model kemitraan yang inovatif dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dapat menjadi topik menarik untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura dan Kepala Distrik Sentni Kabupaten Jayapura, serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Nuddin, A., & Toaha, S. (2023). Strategi pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *AGROVITAL: Jurnal Ilmu Pertanian*, 8(1). <https://doi.org/10.35329/agrovital.v8i1.3889>
- Alarcon, P., Fèvre, E. M., Muinde, P., Murungi, M. K., Kiambi, S., Akoko, J., & Rushton, J. (2017). Urban livestock keeping in the city of Nairobi: Diversity of production systems, supply chains, and their disease management and risks. *Frontiers in Veterinary Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00171>
- Anang, H., & Kadir, S. (2025). Analysis of production function in layer chicken business in Soppeng District. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 211–218. <https://doi.org/10.22194/JGIAS/25.1439>
- Angraini, W., Lambelanova, R., & Ritonga, N. A. (2022). Pemberdayaan petani kelapa sawit di Kecamatan Kampung Rakyat oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(2), 72–92. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2525>
- Djamaluddin, A., Asriadi, A. R., & Abdullahi, A. B. (2020). The policy of Tanete Village government to create conducive laying chicken farm business climate. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 492(1), 012115. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/492/1/012115>
- Hartoyo, B., Sugiarto, M., Wakhidati, Y. N., Rosidi, R., & Muatip, K. (2024). Efektivitas program kemitraan untuk meningkatkan pemberdayaan peternak mitra ayam broiler di Kabupaten Banyumas. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(4), 3382–3392. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i4.23431>
- Lestari, D., & Maimunah, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha ternak ayam petelur di Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Journal on Education*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3853>
- Mintang, B. B., & Korbaffo, Y. A. (2022). Pemberdayaan usaha peternak ayam potong di Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.58290/jupemas.v1i1.41>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Onono, J. O., Alarcon, P., Karani, M., Muinde, P., Akoko, J. M., Maud, C., Fèvre, E. M., Häslér, B., & Rushton, J. (2018). Identification of production challenges and benefits using value chain mapping of egg food systems in Nairobi, Kenya. *Agricultural Systems*, 159, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.10.001>
- Purnawati, L. (2020). Peranan pemerintah desa dalam menangani konflik peternakan ayam broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 229–243. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.117>
- Rahmawati, I. R., Muksin, M., & Rizal, R. (2016). Peran dan kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, 12(2), 183. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i2.12252>
- Silondae, H., Muzayyanah, M. A. U., Sulastri, E., & Guntoro, B. (2022). The role of household-scale local chicken farms in providing family food in Minahasa Regency. *IOP Conference*

Series: Earth and Environmental Science, 1105(1), 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012009>

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif* (Edisi kedua). CV. Alfabeta.

Suwannasri, M., & Promphakping, B. (2022). Sustainability of smallholders in the local food system: A study of chicken layer farms in Nakhon Phanom Province, Northeast Thailand. *Sustainability, 14(10), 5997.* <https://doi.org/10.3390/su14105997>

